

TAJUK RENCANA

Jangan Di-PHK

GUBERNUR DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap manajemen baru Malioboro Mall dan Hotel Ibis Malioboro tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan. Sebaliknya, Sultan berharap manajemen baru melakukan pendataan dan selanjutnya para pekerja dikembalikan sesuai pekerjaan lama mereka atau ditempatkan di posisi baru.

Harapan tersebut disampaikan Gubernur DIY saat melakukan peninjauan di kedua bangunan yang ada di kawasan Malioboro tersebut, Kamis (15/9). Dalam peninjauan tersebut Gubernur didampingi manajemen baru Malioboro Mall dan Hotel Ibis Malioboro. Masalah PHK tersebut mengemuka seiring adanya manajemen baru Malioboro dan Hotel Ibis Malioboro, yang saat ini dipercayakan kepada PT Setia Mataram Tritunggal.

Sementara itu, juru bicara manajemen baru Malioboro Mall dan Hotel Ibis (PT SMT), Surya Ananta menyatakan pihaknya membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi karyawan lama untuk bekerja lagi di tempat ini. Sebab menurutnya, Malioboro Mall dan Hotel Ibis Malioboro memerlukan banyak karyawan. Apalagi Malioboro Mall saat ini tetap beroperasi dan tidak akan ada penutupan.

Khusus hotel, diakui saat ini sedang disiapkan perbaikan dan persiapan teknis, termasuk karyawan. Karena itu manajemen baru membutuhkan kualifikasi karyawan sesuai yang dibutuhkan. Bagi karyawan lama yang memiliki kualifikasi, bisa sesegera mungkin bergabung.

Meskipun saat ini Malioboro Mall dan Hotel Ibis Malioboro dikelola oleh manajemen baru, Sultan memastiyakan ratusan

karyawan tidak akan di-PHK. Hal itu mengingat Malioboro Mall masih akan tetap buka seperti biasa, di bawah manajemen baru. Karena itu, kalau pegawai yang merasa diberhentikan, ada kemungkinan kebijakan itu dilakukan oleh manajemen lama.

Meski begitu, karyawan lama akan mendapat prioritas untuk bekerja kembali di bawa manajemen baru. Ditegaskan oleh Gubernur DIY, pihaknya minta Malioboro Mall tidak ditutup, sebab kalau ditutup dan ada PHK maka akan menimbulkan masalah. Yang pasti, menurut Sri Sultan, pegawai yang sudah ada diprioritaskan untuk bekerja kembali. Juga tidak ada PHK dari manajemen baru.

Bahkan, dengan adanya manajemen baru berarti para pekerja otomatis masuk manajemen baru. Karena itu, karyawan lama tidak perlu lagi dileksi ulang. Mereka tetap menjadi prioritas. Itu untuk karyawan yang sebelumnya memang direkrut oleh PT YIS. Itupun masih akan dicermati lagi, karyawan yang keluar itu karena PHK atau karena sebab lain.

Persoalan pekerja dan pekerja, memang selalu rumit dan dilematis. Dalam kondisi saat ini, banyak pekerja di berbagai perusahaan terkena PHK karena dampak pandemi Covid-19. Berbeda dengan persoalan karyawan Malioboro Mall dan Hotel Ibis Malioboro.

Apapun dalih karyawan atau pekerja diberhentikan, pasti ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dipenuhi perusahaan. Nah, lantas bagaimana nasib mereka sekarang? Pernyataan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, terkait nasib karyawan Malioboro Mall dan Hotel Ibis Malioboro: "Jangan Di-PHK". Ini perlu dicatat. □

Kenaikan BBM dan Pertanian Indonesia

Bayu DA Nugroho

TIGA hari menjelang Peringatan HUT Kemerdekaan RI, tepatnya 14 Agustus 2022, Bangsa Indonesia mendapatkan penghargaan dari IRRI. Penghargaan tentang Sistem Pertanian-Pangan Tangguh dan Swasembada Beras Tahun 2019-2021 melalui Penggunaan Teknologi Inovasi Padi yang diserahkan oleh Direktur Jenderal IRRI Jean Balie kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ini adalah penghargaan khususnya buat petani yang menjadi ujung tombak dan pahlawan pangan.

Masih dalam euforia penghargaan dan juga hari kemerdekaan RI, tidak lama berselang, tepatnya 3 September 2022, masyarakat Indonesia dikejutkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Berita ini tentu mengejutkan karena tentu akan berdampak disemua sektor tidak terkecuali juga sektor pertanian. Meskipun selama masa pandemi Covid-19 sektor pertanian telah menunjukkan ketahanan yang baik dengan tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif, namun sektor pertanian, khususnya petani juga akan mengalami dampak kenaikan BBM.

Kita semua mengetahui, bila capaian swasembada beras nasional dan bukti penghargaan dari IRRI, bukan jaminan bahwa petani Indonesia saat ini sudah pada tahap sejahtera. Dengan melihat realita tersebut, keberpihakan dan solusi kepada petani serta sektor pertanian juga perlu tetap diperhatikan.

Petani Tradisional

Bagi sektor pertanian kalau kita lihat di petani-petani tradisional dan konvensional, mungkin dampak yang dirasakan adalah kenaikan harga-harga supporting budidaya pertanian. Seperti harga pupuk dan biaya logistik karena dari sisi distribusi dan transportasi akan terjadi penyesuaian harga. Kalau dikaitkan petani milenial dan modern, dimana ada penggunaan teknologi ino-



KR-JOKO SANTOSO

berpikir lebih jauh lagi, dampak kenaikan biaya produksi ini akan membuat anak-anak muda atau calon petani milenial berpikir untuk terjun ke dunia pertanian, karena biaya yang tinggi untuk menjalankan usaha taninya dengan teknologi.

SPBU Khusus

Berkaitan dengan permasalahan kenaikan BBM dan kaitannya dengan biaya produksi yang tinggi terutama dalam penggunaan alat dan mesin pertanian yang membutuhkan BBM, solusi yang mungkin bisa dilakukan adalah dengan ada subsidi khusus digunakan untuk

alat dan mesin pertanian petani. Termasuk ada SPBU khusus untuk pertanian, seperti pertamini. Supaya subsidi tersebut tepat sasaran, pelibatan ketua-ketua kelompok tani (PokTan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) menjadi kunci kesuksesan dalam pemberian subsidi supaya tepat sasaran.

Bisa juga dengan memanfaatkan kartu tani, yang selama ini digunakan para petani untuk membeli pupuk maupun aktifitas budidaya pertanian. Hal lain yang bisa dilakukan supaya subsidi tersebut tepat sasaran adalah penggabungan kelompok-kelompok tani dalam suatu ekosistem pertanian. Dengan adanya ekosistem pertanian tersebut, jumlah anggota dan subsidi yang diberikan akan lebih mudah termonitor dan diawasi.

Dengan solusi di atas, tetap ada keberpihakan pemerintah kepada petani yang merupakan pahlawan pangan nasional. Selain itu pertanian di Indonesia tetap bisa mempertahankan bahkan meningkatkan sistem pertanian-pangan tangguh dan swasembada beras melalui penggunaan teknologi inovasi padi. Sehingga regenerasi petani tetap berjalan dengan adanya teknologi inovasi tersebut. □

*) Bayu Dwi Apri Nugroho

PhD, Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Sekretaris Pusat Studi Pengelolaan Sumberdaya Lahan UGM.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opini-kr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkannya fotocopy identitas. Terimakasih.

Bersastra Tanpa Mengandalkan Pemerintah

Sarworo Soeprapto

BEBERAPA waktu lalu, KR menyajikan laporan berjudul 'eYogya dan Sastra yang Saling Melepaskan, Balai Bahasa dan Dinas Kebudayaan DIY Digugati' (19/8). Kesan yang langsung muncul ada tiga hal. Pertama, kedua narasumber dialog sastra yang digelar Taman Budaya Yogyakarta tadi kurang mengetahui pasti kegiatan kedua lembaga pemerintah tersebut selama ini. Kedua, keduanya tidak memahami dengan jelas tupoksi kedua lembaga tadi, khususnya Balai Bahasa. Ketiga, keduanya terkesan kekanak-kanakan, yang menuntut pihak di luar dirinya harus begini begitu agar dirinya bisa berkiperah di bidang tertentu (baca: sastra).

Tanpa bermaksud membela aktivitas Disbud DIY dan BBY, selama ini dan sependek yang penulis ketahui, kedua lembaga tadi sudah berbuat maksimal untuk dunia sastra di Yogya. Boleh jadi aktivitasnya dalam mendorong perkembangan sastra belum maksimal sekali. Ini terjadi karena sastra Indonesia di Yogya, ibarat anak, sudah dapat berjalan sendiri. Tanpa banyak bantuan pihak-pihak luar pun, sastra Indonesia di Yogya sudah mampu eksis sendiri.

Sastra Jawa

Disbud DIY dan BBY terkesan kurang maksimal dalam membantu mengembangkan Sastra Indonesia, juga disebabkan karena perhatiannya juga harus diberikan untuk Sastra Jawa. Berbeda dengan banyak daerah lain, selain Jateng dan Jatim, dunia sastra daerah di DIY berkembang relatif dinamis, sehingga juga perlu perhatian. Ibarat anak, Sastra Jawa di DIY belum mampu berjalan sendiri. Agar dapat berkembang dinamis, Sastra Jawa di DIY masih perlu banyak dibantu, baik oleh Disbud maupun BBY.

Kalau kita menengok perkembangan sastra, khususnya Sastra Indonesia se-

belum reformasi, selain Disbud dan BBY juga ada pihak-pihak lain yang ikut berperan. Karta Pustaka (almahrum), kampus, media massa (cetak dan elektronik) dan sanggar-sanggar turut berkiperah secara signifikan. Ketika Karta Pustaka sudah tidak ada lagi dan semua media massa sedang terseok-seok kehidupannya akibat disrupsi, seharusnya dunia kampus tampil di garda depan. Organ-organ budaya di UGM, UNY, UIN, UAD, dan UST, yang dulu berkontribusi secara nyata dalam perkembangan sastra, termasuk teater, selama ini ngapain?

Stimulatif-Dinamisator

Perlu disadari, siapapun yang bergiat di bidang kesenian, khususnya seni sastra, harus menyadari betul bahwa peran lembaga-lembaga pemerintah di bidang pengembangan budaya hanyalah sebagai stimulator dan dinamisator. Tak kurang dan tak lebih. Lembaga-lembaga pemerintah yang menangani urusan budaya memiliki keterbatasan sumberdaya, baik sumberdaya manusia maupun ekonomi. Mereka bekerja sesuai program yang disusun per tahun. Lagi pula, urusan budaya yang mereka urusi juga tidak hanya bahasa dan sastra, melainkan juga elemen dan sub-elemen budaya yang lain.

Sejarah perkembangan sastra di Indonesia termasuk di Yogya, sesungguhnya telah berbicara banyak bahwa kiprah dan eksistensinya sastra tidak semata-mata ditentukan keberadaan lembaga-lembaga pemerintah. Kiprah Pramoedya Ananta Toer, Rendra, Emha Ainun Nadjib dan Ashadi Siregar, sekadar contoh, apakah karena peran Disbud dan Balai

Bahasa? Juga, totalitas novelis Budi Sardjono dan penulis roman sejarah Sri Wintala Achmad, dalam berkarya selama ini, apakah juga karena peran Disbud dan BBY? Jelas tidak!

Sebagaimana pernah dikatakan Budi Sardjono, perkembangan sastra, baik Indonesia maupun daerah, 100 persen tergantung para sastrawannya! Pihak lain hanya berperan sebagai stimulator dan dinamisator. Karenanya, berhentilah merengek-rengok, mengharapakan lembaga-lembaga pemerintah dapat menjadi penentu perkembangan sastra. Kalaupun selama ini Disbud dan BBY, telah membantu mengembangkan sastra melalui aneka lomba dan sayembara, juga melalui aneka diskusi, itu semua tak lebih hanyalah sebagai stimulan dan pendinamisan. Atau, bisa juga sebagai penambah 'egizii' dan semangat □

*) Sarworo Soeprapto, peminat masalah sosial dan kebudayaan.

Pojok KR

Manajemen baru Malioboro Mall dan Hotel Ibis diminta tidak me-PHK karyawan.

-- Setuju!

Kapolda DIY mendukung bakti sosial HUT ke-77 Kedaulatan Rakyat.

-- Migunani.

Pendaftaran calon Panwasca dibuka sampai 21 September 2022.

-- Siapa ikut?

Beraba

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik

Naskah dikirim Email atau WA

@pikiranpembaca@gmail.com

0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Pesona Busana Daerah Indonesia

DALAM beberapa tahun ini Presiden Jokowi selalu mengenakan busana daerah Indonesia, dalam acara-acara kenegaraan. Tentu sangat menarik. Karena mau tidak mau, suka tidak suka akan membuat kita mengenal betapa luar biasa ekekayaan daerah Indonesia yang selama ini nyaris tidak kita kenal. Tentu ini membanggakan. Selain akan membuat kita mengenal nama daerah dan busana adatnya juga sekaligus membuat pesona tersendiri. Dan ini belum mengungkap kekayaan yang lain : missal kuliner tradisional, busana dan tata rias pengantin, adat istiadat, bentuk dan arsitektural rumah dan lainnya.

Yang kian menarik, kini di DIY khususnya juga mulai menampakkan hal itu. Ada kewajiban

anak-anak sekolah dan pegawai negeri berbusana daerah pada hari tertentu. Entah masih dilaksanakan tidak, pascapancemi covid-19, setelah pembelajaran daring dan work from home. Selasa Wagen juga baru dimulai setelah 2 tahun vakum. Dan kian menarik di lembaga pendidikan tinggi swasta pun mulai juga dilakukan. Bukan hanya panitia pelaksana berbusana daerah, namun pejabat termasuk rektor juga mengenakannya. Ini tentu akan memberikan motivasi dan dorongan psikologis khususnya dari mahasiswa baru yang beradad dari luar DIY.

Alangkah indahnya Indonesia? Bangga sebagai warga Indonesia. □

Anggit, alumni sekolah hotelan di Yogya

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: Drs H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019). **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirnon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurinya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lempersari No 62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552, Wakil : Drs M Thoha.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd, Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP